

# PENDIDIKAN BEBAS BIAYA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH/MADRASAH

Sri Winarsih

Pasca Sarjana IAINU Kebumen

**Abstract:** *Cost is flow of resource, calculated in set of monetary which released to buy or pay inventory, service, labor, product, equipment and other goods, used for business or others interest. Education is process where someone obtain to get knowledge (knowledge acquisition), developing skill or ability (development skill) attitude or change attitude. Education is a process of student's transformation in order to reach certain things as effect of follow education. Cost of education consist of (1). Direct cost is the expense from parent to learn, example: cost of the text book, practice etc. (2). Indirect cost is the expense from parent, people or government which indirect relate to learning process, for example: levying the building, public utilities, canteen, school health unit, etc.*

**ملخص:** التكاليف هي الموارد المحسوبة في حساب العملة المتصرفة للبيع أو دفع الأشياء المعدة، والعمل، والعمال، والانتاج، والأدوات، وغيرها من الأشياء المستعملة لمصلحة التجارة أو غيرها. والتربية هي عملية يحصل فيها المرء على المعارف والمعلومات، وتنمية استعداداته وكفاءته، وسلوكياته. والتربية كذلك عملية اصلاح التلاميذ ليحصل على الأشياء الخاصة نتيجة عملية التربية التي اتبعها. وثمة تكاليف تربوية وهي: (١) التكاليف المباشرة، هي التكاليف التي دفعها الطالب أو والداه لمهمة عملية التعلم والتعليم، وعلى سبيل المثال لشراء الكتب، والتربية التدريبية وغيرها، (٢) التكاليف غير المباشرة، وهي التي يدفعها الطالب أو والداه، أو المجتمع، أو الحكومة للمهمة التي لا ترتبط مباشرة بعملية التعلم والتعليم، مثل التكاليف لبناء المدارس، أو الوسائل العامة، أو المقصف للمدرسة، أو عيادة الصحة وغيرها.

**Keywords:** Pendidikan, bebas biaya, mutu, sekolah.

## PENDAHULUAN

Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun bebas biaya memang menjadi impian setiap warga negara Indonesia. Namun, pendidikan bebas biaya itu sendiri masih sering disalahartikan. Interpretasinya pun bermacam-macam. Ada yang mengartikan pendidikan bebas biaya adalah tidak membayar uang sekolah berikut dengan segala keperluan lainnya seperti buku, seragam,

transportasi, dan sebagainya. Ada pula yang mengartikan pendidikan bebas biaya hanya meliputi biaya operasional sekolah saja. Menurut Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto, jenis biaya pendidikan berdasarkan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ada tiga, yakni biaya operasional yang merupakan biaya input pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiap tahunnya meliputi biaya operasional personel dan biaya operasional nonpersonel. “Pemerintah hanya menanggung biaya operasional sekolah seperti uang sekolah, gaji guru, dan sebagainya. Biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah dan sebagainya masih dibebankan pada orang tua,” ujarnya. Kedua, biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Dan ketiga, biaya pribadi yang merupakan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa.

## HAKEKAT BIAYA PENDIDIKAN GRATIS

Dalam akuntansi, yang dimaksud dengan biaya adalah aliran sumberdaya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar persediaan, jasa, tenaga kerja, produk, peralatan, dan barang lainnya yang digunakan untuk keperluan bisnis atau kepentingan lainnya. Biaya juga didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

Dalam arti luas, pendidikan adalah proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge acquisition*), mengembangkan kemampuan atau keterampilan (*skillsdevelopment*) sikap atau merubah sikap (*attitude change*). Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan Syaiful Sagalamengatakan bahwa pendidikan didefinisikan sebagai penghubung dua sisi, disatu sisi individu yang sedang tumbuh berkembang, dan disisi lain nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu

tersebut<sup>1</sup>. Selain pendapat tersebut John Dewey (1958) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang tanpa akhir (*education is the process without end*) dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Berdasarkan definisi di atas jelaslah, bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk memberikan dan menciptakan pemahaman aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga tercipta sumber daya yang memiliki kekuatan iman dan kompetensi yang diharapkan. Jadi biaya pendidikan adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses yang dilakukan secara sadar secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk memberikan dan menciptakan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, menyatakan: “Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Kalau kita simak, maksud kemerdekaan disini tidak sekedar mengandung hak berdaulat atau mengatur bangsanya sendiri, tetapi juga mengandung makna sekaligus amanah bahwa hak warga atau rakyat dalam status bangsa tersebut secara bebas, merdeka dan otonom mengembangkan dirinya (kehidupannya).

Selanjutnya pada alinea keempat, ditegaskan pula: “Mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kemudian, ditutup dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini lebih menegaskan bahwa negara dalam hal ini Pemerintah yang berkuasa, mempunyai tanggung-jawab yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Bagaimana warga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengenyam (memperoleh) pendidikan. Kebodohan, keterbelakangan, minimnya ketrampilan dan lainnya, yang merupakan ciri atau potret kemiskinan selama ini, bisa jadi merupakan pengaruh dari ‘ketidakadilan dan tidak dimilikinya kepedulian dalam pengelolaan pendidikan’. Bukankah dalam UUD 1945, salah satu pasalnya menyebutkan: “Tiap-tiap warga Negara, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Dalam hal ini, untuk menuju ke arah sana, Negara dan Pemerintah tentunya harus mempersiapkan sebuah Perencanaan Pendidikan Nasional yang mampu merespon dan mengakomodir hak warga dalam merealisasikan (mewujudkan) kesempatan, mengikuti setiap jenjang pendidikan yang ada, yang nantinya akan bersinergi dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja tersebut. Bukankah kita hidup dari Sumber Daya Alam yang sama, seharusnya kesempatan memperoleh pendidikan tidak menjadi

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 3.

hambatan, apalagi menjadi beban berat bagi orang yang tak mampu. Bagaimana potret pendidikan nasional kita, harapan seperti apakah pendidikan nasional kita ke depan? Apakah bila lain kabinet, maka lain pula Menteri dan lain pula kebijakannya? Sudah menjadi hal yang lumrah, bongkar pasang kurikulum tidak hanya mengakibatkan anak didik (siswa) menjadi objek sekolah, pelajaran dan sistem pengajaran, yang juga membuat para guru dibuat repot jadinya.

## KEBUTUHAN OPERASIONAL SEKOLAH

Fungsi Produksi adalah yang menjalankan manajemen dan pembiayaan, dan fungsi produksi pendidikan adalah mengukur input, proses, dan output<sup>2</sup>. Alokasi kebutuhan sekolah seperti keperluan operasional pengajaran, operasional administrasi dan perkantoran, operasional laboratorium, operasional perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan, penggantian barang-barang mendesak, kebersihan dan kesehatan dapat diidentifikasi oleh kepala sekolah bersama masyarakat dan pemerintah mencari solusi untuk memenuhi keperluan tersebut. Manajemen sekolah yang baik dan berkualitas tentu harus di dukung ketersediaan pembiayaan untuk keperluan tersebut. Lalu yang dapat melakukan investasi dalam jumlah yang besar adalah pemerintah daerah melalui APBD, pemerintah pusat melalui dana perimbangan (APBN), dan bantuan masyarakat luas. Untuk menegosiasi alokasi dana sesuai keperluan baik kepada pemerintah maupun masyarakat peran kepala sekolah akan memberi andil yang signifikan. Jika sekolah negeri kekurangan dana, karena suplay dari pemerintah pusat sangat terbatas, maka kepala sekolah cenderung menunggu alokasi dana berikutnya dari pemerintah pusat daripada melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dana. Sikap demikian tidak salah karena sistemnya tidak mendukung, jika kepala sekolah berinisiatif untuk mengatasi dari dana lain diluar alokasi pemerintah belum ada aturan yang membenarkannya dan semua resiko atas perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi kepala sekolah yang bersangkutan. Terbelenggunya kreatifitas kepala sekolah karena kaku dan sentralistiknya birokrasi pendidikan, tidak bisa diharapkan ada inovasi baru dari sekolah, semata-mata bukan karena kualitas SDM nya yang rendah, tetapi karena sistem tidak mendukung atau memberi ruang gerak untuk suatu kreatifitas dan inovasi. Di lihat dari aturannya bahwa UUSPN No.20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan undang-undang bahwa penyediaan anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab negara baik

---

<sup>2</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, 138

pemerintah pusat yang bersumber dari APBN maupun pemerintah provinsi yang bersumber dari APBD dan kabupaten/kota juga bersumber dari APBD.

## BIAYA MASUK SEKOLAH

Setiap awal tahun pelajaran baru, hal paling memusingkan orangtua adalah menyediakan biaya pendidikan bagi putranya. Antara lain untuk membayar uang pangkal, iuran bulanan, pakaian seragam, buku, dan sebagainya. Menurut Nanang fattah (2003:107) Biaya langsung (*Direct Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa atau orang tua murid untuk keperluan proses belajar mengajar, misalnya: biaya untuk buku pelajaran, praktek, dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsung (*Inderect Cost*) adalah biaya yang di keluarkan oleh siswa, orang tua murid, masyarakat, atau pemerintah untuk keperluan yang tidak langsung berhubungan dengan keperluan proses belajar mengajar, misalnya: biaya untuk pengadaan gedung, sarana umum, kantin, UKS, dan sebagainya<sup>3</sup>. Untuk masuk TK saja, di Banjarmasin ini misalnya, uang pangkalnya bisa sampai setengah juta rupiah. Untuk SLTP mencapai satu juta, sedangkan untuk SMA atau SMK pada umumnya di atas satu juta rupiah. Belum lagi biaya lainnya. Bisa dibayangkan kalau mempunyai anak empat atau lima orang, bukan main repotnya.

Oleh karena itu tidak heran jika kebanyakan orangtua menginginkan pendidikan itu gratis, agar tidak pusing memikirkan biayanya. Maunya orangtua hanya menitipkan anaknya pada satu sekolah, dan tinggal memetik hasilnya setelah anaknya lulus. Tapi di lain pihak, sekolah juga perlu dana untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Semakin maju sebuah sekolah, semakin lengkap fasilitas yang dimilikinya, semakin besar pula biaya operasionalnya. Dengan demikian, semakin tinggi pula pungutan yang dibebankan kepada orangtua. Pungutan ini yang sering dikeluhkan orangtua itu.

## BIAYA BUKU PELAJARAN

Belum lagi, keluhan para orang tua murid yang setiap ganti tahun ajaran harus menyediakan sejumlah dana tertentu untuk keperluan buku-buku pelajaran, karena buku-buku yang lama atau terdahulu kemungkinan besar tidak akan dipakai lagi, seharusnya buku-buku tersebut tidak ditinggalkan begitu saja bisa dipakai sebagai bahan referensi dan atau dikelola oleh sekolah dengan melakukan pengumpulan dari murid-murid yang sudah tidak memerlukan lagi buku tersebut untuk koleksi perpustakaan sekolah. Sinyalemen

---

<sup>3</sup> Nanang Fattah, *Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah* (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy 2003), 107.

atau isu adanya ‘campur tangan’ industri penerbitan dalam pengadaan buku pelajaran, turut mewarnai corat-maritnya potret pendidikan nasional kita. Kita bukannya menafikan kehadiran mereka dalam ikut serta mensukseskan proses penyelenggaraan pendidikan, dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat dan tulus bahwa kehadiran industri penerbitan buku-buku pelajaran sekolah tidak sekedar profit motif. Departemen Pendidikan Nasional atau yang di daerah seharusnya punya kewenangan dan ketegasan dalam menjaga substansi pokok-pokok pembelajaran dari tingkat dasar sampai menengah, termasuk baku mutu pendidikan yang jelas dan terukur.

## TARGET APBN UNTUK PENDIDIKAN

Otonomi daerah seharusnya dapat dimaknai pada sebuah kompetisi pelayanan publik, adanya pelimpahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota, seharusnya dapat mempercepat aktivitas dan lajunya pembangunan dengan menciptakan Pemerintahan yang baik atau istilah ‘*good governance/good government*’, kalau di negara Inggris disebut ‘*good administration*’, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan ‘*behoorlijk bestuur*’, artinya pemerintahan yang layak atau baik. Target porsi APBN untuk sektor pendidikan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan sebesar 20%, memang cukup menjanjikan dari sisi ketersediaan dana untuk menyokong majunya pendidikan nasional kita, dan sangat dimungkinkan untuk pendidikan dasar dan menengah biaya pendidikan diperoleh secara gratis. Apakah target 20% porsi APBN untuk sektor pendidikan tersebut bisa terpenuhi sesuai harapan Pemerintah dan sekaligus dambaan rakyat, khususnya rakyat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

Belum lagi persoalan menuju ‘Indonesia Sehat’ tahun 2010 juga cukup banyak menyedot dana APBN untuk mensukseskannya. Lebih parah lagi persoalan utang luar negeri kita, banyak program Pemerintah yang harus dibiayai dari sumber dana utang luar negeri, dan mudah-mudahan, suatu saat nanti, bangsa kita akan terbebas dari utang. Selain itu, kita harus mampu membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan Sumber Daya Alam, sehingga, mari kita majukan dan bangkitkan pendidikan nasional kita.

Persoalan pendidikan tidak sekedar bagaimana setiap warga mendapatkan kesempatan belajar atau mengikuti jenjang pendidikan tersebut terjangkau, dalam artian, apakah aspek pembiayaan, sarana prasarana, kualitas guru termasuk kesejahteraan guru itu sendiri. Akan tetapi, bagaimana suatu sekolah atau jenjang pendidikan menjadikan anak didik atau siswa menjadi mandiri dan berdaya serta adanya kepastian termasuk rasa percaya diri untuk ‘berkompetisi’

dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau memasuki dunia kerja baik di sektor pemerintah dan atau sektor swasta. Yang pada akhirnya, para orang tua termasuk si anak, tidak akan ragu sedikitpun, ketika memutuskan suatu pilihan, kalau dikatakan bahwa, mengikuti sekolah atau jenjang pendidikan adalah sebuah nilai investasi yang tak ternilai harganya.

Mengenali sebab-sebab terjadinya kondisi tidak tertampungnya para lulusan sekolah atau akademi, perguruan tinggi dan atau yang sejenis dalam industri ketenagakerjaan, juga menjadi lebih penting untuk merumuskan tindakan (kebijakan) pendidikan itu sendiri maupun oleh Departemen Tenaga Kerja. Termasuk, kalau Pemerintah dan kita jeli mencermatinya sebenarnya 'persoalan' masalah dunia pendidikan dan ketenagakerjaan adalah bagian dari ketahanan negara. Gejala buruh, pengangguran bisa menghambat lajunya sebuah pembangunan, investasi termasuk kepercayaan publik, swasta, maupun pihak luar terhadap Pemerintah.

## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang (dasar, menengah dan tinggi) perhatian dipusatkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kecukupan sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan, dalam arti kecukupan dalam jumlah dan mutu guru, buku teks bagi murid, dan sarana belajar yang memadai, untuk itu implikasi kebijakan yang sangat realistis adalah peningkatan anggaran pendidikan.
2. Kualitas manajemen sekolah harus ditingkatkan.
3. Alokasi anggaran lebih di prioritaskan untuk berbagai penyuluhan yang berlangsung menyentuh kebutuhan PBM, sementara pembangunan fisik gedung atau infrastruktur selama transisi sampai tercapai keseimbangan biaya pendidikan dapat di tangguhkan.
4. Adanya ketidakseimbangan antara kompetensi lulusan, terutama perguruan tinggi, dengan kompetensi kebutuhan tenaga kerja dan persaingan yang makin meningkat sebagai dampak globalisasi serta bertambahnya pengangguran dan pencari kerja, dianggap perlu di kembangkan budaya *enterpreneurship* yang mengubah orientasi lulusan dari *jobsektor* (pencari kerja) menjadi *job creator* (pencipta kerja) penerangan utama meningkatnya ragam kesempatan berusaha.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkatkan, antara lain dengan mengembangkan mekanis-

me kerjasama saling menguntungkan bagi peserta didik, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha.

6. Untuk menjembatani kesenjangan dalam kesempatan, memperoleh pendidikan yang bermutu dengan melakukan restrukturisasi penerimaan dan pengeluaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera dilakukan.
7. Pendidikan dasar bisa merupakan tahapan yang kritis dan awal yang baik dalam upaya pembentukan watak dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
8. Pembiayaan pengembangan sumber daya manusia rata-rata sekitar 20 % terhadap anggaran total APBN dengan kecenderungan yang tidak tentu dalam presentasinya<sup>4</sup>.

## KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah merespon keluhan dengan melakukan dua kebijakan, yaitu menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) dan melarang guru menjual buku di sekolah. Cuma kesalahannya, belum dikaji permasalahannya secara mendalam sudah digembar-gemborkan dengan adanya BOS tidak ada lagi pungutan lain dari sekolah. Padahal kenyataannya tidak demikian, sehingga orangtua pun kecewa. Dana BOS dari pemerintah selain jumlahnya terbatas, peruntukannya sudah ditentukan, sehingga tidak bisa digunakan untuk sembarang pengeluaran. Pengeluaran sekolah yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS antara lain:

1. Membayar honorarium tenaga Satpam.
2. Biaya pemeliharaan sarana/prasarana sekolah seperti musholla, lapangan basket dan voli, tempat parkir kendaraan, ruang OSIS, ruang ganti pakaian, koperasi, dan sebagainya.
3. Tambahan belajar buat siswa sore hari.
4. Kegiatan ekstra kurikuler seperti latihan olahraga, seni, pramuka, PMR, karya ilmiah remaja, dan sebagainya.
5. Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.
6. Kegiatan sosial seperti menyumbang panti asuhan, yayasan, dan sebagainya.

Semua pengeluaran ini jelas untuk kepentingan siswa. Namun keberatan kebanyakan orangtua adalah suatu fakta. Penyebabnya antara lain: 1) Beratnya

---

<sup>4</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 82

biaya hidup yang ditanggung orangtua saat ini, terlebih mereka yang tinggal di perkotaan. Biaya makan, listrik, air dan BBM harus dikeluarkan setiap bulan dan jumlahnya senantiasa meningkat setiap waktu. Bagi golongan menengah ke bawah, menanggulangi biaya ini saja sudah repot, apalagi ditambah biaya pendidikan anak-anak. 2) Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Orangtua tidak segera merasakan manfaatnya. Berbeda kalau membeli kulkas, pesawat televisi, mesin cuci, dan sebagainya. Mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak seperti sesuatu yang sia-sia. 3) Ada pula orangtua yang lebih sayang rumah atau kendaraan pribadinya dari pada anaknya. Untuk membanggakan rumah atau kendaraan pribadinya, sang ayah tidak segan-segan mengeluarkan biaya sampai jutaan rupiah. Tapi untuk membanggakan anaknya tidak akan semudah itu. 4) Ada juga orangtua yang mempunyai imej kurang baik terhadap sekolah. Mungkin karena pengalaman yang tidak enak di masa lalu ketika bersekolah. Barangkali pernah tidak naik/lulus, kena sanksi dan sebagainya. Orangtua jenis ini tidak pernah mau membantu sekolah. Selalu sinis kalau mendengar ada pungutan dari sekolah. Hanya manyamani guru. Paling-paling nanti dikorupsi, demikian antara lain komentar mereka. 5) Melarang guru menjual buku di sekolah, juga ada segi negatifnya. Hal ini dapat menyebabkan siswa malas membeli buku, karena di toko buku harganya lebih mahal. Uang untuk membeli buku malah mereka gunakan untuk membeli kaset, CD play station, pulsa HP, dan sebagainya. Akibatnya banyak siswa yang belajar tanpa buku. Dengan mengandalkan buku catatan seadanya, tanpa buku pelajaran, bagaimana seorang siswa bisa berprestasi di sekolah.

Jadi di sini terjadi pertentangan antara dua pihak. Di satu pihak, orangtua keberatan terhadap berbagai pungutan dari sekolah. Di lain pihak, sekolah memerlukan dana tambahan untuk kelancaran kegiatan operasional sekolah (terutama kegiatan belajar mengajar). Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai solusi dari permasalahan ini, yaitu:

Orangtua harus dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Paling lambat satu minggu sebelum diadakan rapat antara sekolah dengan orangtua (rapat komite sekolah), RAPBS itu harus disampaikan kepada orang tua. Dengan demikian, orangtua mempunyai waktu untuk mempelajarinya. Andaikata, misalnya, direncanakan untuk membangun musholla dengan biaya Rp. 50 juta, orangtua bisa meninjau lokasinya, berapa ukurannya, bagaimana desainnya, sehingga dapat menilai apakah anggaran sebesar itu cukup realistis. Jika waktu pelaksanaannya --misalkan-- dua tahun, orangtua bisa mengusulkan menjadi empat tahun sehingga biaya bisa dipotong separonya. Kalau sekolah ingin membangun ruang OSIS misalnya, orangtua bisa melihat apakah di sekolah itu ada ruangan yang tidak terpakai. Kalau ada, orangtua bisa mengusulkan memakai ruangan itu saja dengan sedikit renovasi.

Dengan demikian, pungutan terhadap orangtua bisa diperingan. Jadi usulan dari orangtua lebih konkrit, tidak seperti yang terjadi selama ini, hanya ada tawar menawar antara orangtua dengan komite sekolah.

Pungutan terhadap orangtua hendaknya disesuaikan dengan kemampuan, tidak merata seperti yang berlaku sekarang. Caranya, orangtua diwajibkan menyerahkan surat keterangan penghasilan. Bagi pegawai negeri, misalnya, dikeluarkan oleh bendaharawan dan disahkan oleh atasan langsung. Bagi masyarakat umum, ditandatangani oleh ketua RT dan disahkan oleh lurah. Berdasarkan surat keterangan ini, komite sekolah dapat menentukan besarnya uang yang harus dibayar orangtua. Dengan cara ini, tidak tertutup kemungkinan adanya orangtua yang dibebaskan dari pembayaran. Jadi, tidak ada lagi anak yang tidak dapat bersekolah lantaran tidak mampu bayar.

Komite sekolah harus aktif menggali sumber dana lain, selain dari pungutan terhadap orangtua. Misalnya, sebagian dana yang terkumpul dari uang pangkal bisa digunakan untuk usaha yang mendatangkan uang. Seperti membuka usaha fotokopi, wartel, kantin sekolah, dan sebagainya. Dalam hal ini pengurus komite sekolah harus dipilih mereka yang mau dan pintar bekerja, bukan yang hanya pintar bicara. Kesalahan kebanyakan orangtua selama ini hanya pandai mengeluh, tapi tidak mau terlibat langsung menangani permasalahannya. Buktinya, setiap ada rapat komite sekolah, sebagian besar orangtua tidak mau hadir.

Untuk menangani masalah buku pelajaran, pemerintah hendaknya segera merevisi buku paket yang ada supaya sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian dibagikan sesuai dengan jumlah siswa. Buku tambahan dapat diusahakan oleh komite sekolah, dibeli dan dipinjamkan kepada siswa dengan cuma-cuma.

Soal tes masuk perguruan tinggi juga hendaknya tidak keluar dari kurikulum yang berlaku di SMA atau SMK, sehingga siswa tidak harus mencari bahan tambahan di luar materi yang diterimanya di sekolah. Menurut Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto menjelaskan perkiraan kebutuhan biaya operasional per siswa per tahun untuk SD Rp.1.109.000/siswa/tahun di mana besarnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp.254.000/siswa/tahun. Kebutuhan biaya operasional untuk SMP sebesar Rp.1.595.000/siswa/tahun, di mana besarnya dana BOS Rp.354.000/siswa/tahun. Suyanto menjelaskan, setiap tahun pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp.29.790 triliun untuk 26.862.332 siswa SD. Namun pemerintah hanya mampu menyediakan dana BOS sebesar Rp.6,823 triliun. Untuk SMP, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp.14,379 triliun untuk 9.015.069 siswa. Namun dana yang disediakan untuk BOS baru mencapai Rp.3,191 triliun. "Dalam hal ini ada kekurangan dana sebesar Rp.22,967 triliun untuk SD dan Rp.11,188

triliun untuk SMP,” lanjutnya. Suyanto menambahkan, dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini ada beberapa daerah yang peduli dengan hal itu dengan mengalokasikan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari APBD-nya seperti DKI Jakarta yang mengalokasikan DOP sebesar Rp.50.000/siswa SD/bulan dan Rp.100.000/siswa SMP/bulan, Padang Pariaman Rp.8 juta/bulan/sekolah SD, Kota Pasuruan Rp.10.000/siswa SD/bulan dan Rp.20.000/siswa SMP/bulan. Dan Dompu Rp.200.000/siswa/tahun. Sebagian pemda juga mengalokasikan dana untuk insentif guru seperti di DKI Jakarta Rp 1-2 juta/bulan, Minahasa Selatan Rp 100.000/bulan, Nunukan Rp.650.000/bulan, Malinau Rp.850.000-1.350.000/bulan, dan Kutai Timur Rp.400.000-1.000.000/bulan. Namun, ada pula pemda yang tidak mengalokasikan dana dari APBD untuk sekolah/siswa/guru. Sebagian pemda ada pula yang membuat kebijakan sekolah gratis, tetapi dana yang diterima oleh sekolah hanya dana BOS, tidak ada tambahan dana APBD.

”Kesiapan pemda dalam melaksanakan pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah tetapi juga ditentukan oleh kemauan dan komitmen Pemda,” kata Suyanto. Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika mengatakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus gratis. Meski gratis, lanjut Dodi, pendidikan dasar harus dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimana mutu pendidikan dasar yang dimaksud tetap terjamin, minimal sesuai dengan SNP. “Pemenuhan SNP ini bisa dilakukan secara bertahap. Sebab secara teoritis, SNP bersifat dinamis dalam arti ambang batas setiap aspek standar sangat mungkin terus meningkat sejalan dengan kemajuan peradaban,” ujarnya. Menurutnya, meski gratis, namun harus diperhatikan delapan standar nasional pendidikan yakni standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan ketenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Deputi Bidang SDM dan kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani mengatakan pendidikan dasar gratis bagi semua warga negara telah diamanatkan oleh UUD 45 Amendemen ke-3 Pasal 31 Ayat 2 dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, konsep gratis harus dipandang dari penerima layanan pendidikan dan siswa menerima layanan pendidikan dasar tanpa harus membayar di tempat layanan yang disediakan dalam hal ini sekolah. Nina menilai ada beberapa program seperti BOS efektif telah membebaskan siswa di sebagian besar sekolah utamanya di daerah pedesaan dari kewajiban financial di sekolah. Menurutnya, penerapan SNP tentu berimplikasi terhadap kebutuhan sumber daya yang sangat besar, juga bagaimana menegakkan penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sebagai persyaratan minimum layanan di tingkat sekolah.

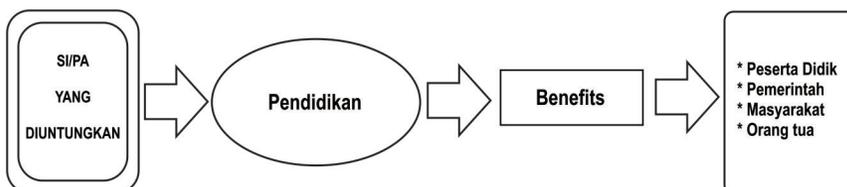
Komponen untuk meningkatkan SPM adalah:

- ✓ Personil
- ✓ Infrastruktur
- ✓ Peralatan
- ✓ Media

Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo mengatakan sebetulnya sudah dapat menyelenggarakan pendidikan gratis dengan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti DBH, DAU, dan DAK. Masing-masing sumber dana perimbangan ini saling mengisi dan saling melengkapi seperti PAD juga bisa dipakai sebagai sumber wajar dikdas sembilan tahun yang merupakan tanggung jawab daerah. Persoalannya kini adalah tergantung keinginan kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk merealisasikannya. Dalam mempertanggung jawabkan keuangan negara ada sembilan jenis buku yang harus disediakan yaitu: (1) Buku kas umum, (2) buku bank, (3) buku kas posisi, (4) buku surat perintah membayar uang (SPMU), (5) buku panjar kerja, (6) buku menghitung pajak orang/pajak penjualan (MPO/PPN), (7). buku penerbitan cek, (8) buku Inventaris (9) buku pembantu lain apabila mempergunakan buku kas umum yang tidak tabelaris.<sup>5</sup>

## PENGUKURAN MANFAAT PENDIDIKAN DAN HASIL BIAYA PENDIDIKAN

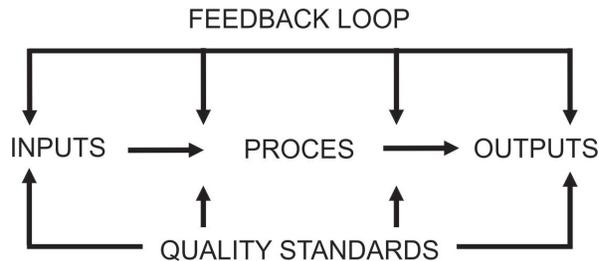
Hasil dan manfaat pendidikan dapat diukur dari produktivitas kerja. Peningkatan efisiensi, meningkatnya kesadaran sosial, dan secara nasional meningkatkan pendapatan dan akhirnya kesejahteraan.



<sup>5</sup> (Pedoman Pengelolaan keuangan di lingkungan Depdikbud, 1982) Tim dosen jurusan Administrasi pendidikan, *Pengelolaan pendidikan*, (Bandung: UPI/Universitas Pendidikan Indonesia 2005), hal.156

## Benefit of Education

*Measuring the benefit of education : pengukuran benefit adalah hasil akhir proses inouts – outputs of education*



## PENUTUP

Pemerintah harus secara tegas menjelaskan batasan pendidikan dasar gratis bagi seluruh siswa di SD negeri di seluruh Indonesia itu dalam hal apa saja. Gratis yang dimaksudkan tersebut apakah hanya sumbangan BP3-nya (baca: SPP) atau keseluruhan kebutuhan biaya pendidikan siswa selama mengikuti dan menuntaskan pendidikannya di tingkat dasar. Klarifikasi tentang batasan pendidikan gratis yang dimaksudkan itu mutlak dilakukan agar tidak terjadi misunderstanding dan miskonsepsi. Efisiensi pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan yang selama ini begitu memberatkan orangtua, apalagi sesungguhnya pengeluaran tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan proses pembelajaran, harus segera dipangkas. Jika pemerintah (Depdiknas) sungguh-sungguh mempunyai political will yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, maka untuk menutupi kekurangan alokasi dana pendidikan dasar gratis tersebut, pemerintah (termasuk pemerintah daerah) harus mencari alokasi dana alternative. Sangat besar untuk menggratiskan pendidikan dasar di SD negeri di seluruh Indonesia, maka efektivitas pola pemberian beasiswa seperti yang telah dilakukan saat ini dapat menjadi pilihan yang sangat elegan dan realistis yang dapat dilakukan pemerintah.

Pentingnya perencanaan pengelolaan pendidikan dalam rangka mempersiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan secara realistis, harus berpedoman pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan rinci. Perlunya bank data, mulai kependudukan jenjang usia dan sebarannya, jumlah sekolah, guru dan daya tampung sekolah serta rasio jumlah guru dan murid, termasuk kebutuhan dunia kerja, harus menjadi satu kesatuan perencanaan yang terintegrasi. Untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan, perlu di kembangkan sikap mental *enterpreneur* bagi para lulusan dan pembentukan program-program pendidikan yang paling efisien.

Anggaran pendidikan di samping dianggarkan pada Dana Alokasi Umum dari APBN,sebaiknya juga di anggarkan pada Dana Alokasi khusus dari APBD.ini di sebabkan kemampuan APBN relatif masih belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang relatif cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suryadi, Ace, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan*, Jakarta: PT Balai Pustaka.1999.
- Becker G.S, *Human Capital, A theoretical and Empirical Analysis with Speccial reference to Education*, Chicago, University of Chicago P ress, 1993.
- Alma,Buchari, *Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran JasaPendidikan*, Bandung : CV alfabeta.2008.
- Elchanan, Cohn, *The Economics Of Education*, Ballinger Publishing, 1979.
- Engkoswara, *Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Pembudayaan*, Bandung, Yayasan Amal Keluarga, 2002.
- Nandika, Dodi, *KebijakanPembangunan Pendidikan 2005-2009*, Bandung: UPI.2005.
- Fattah,Nanang, *Landasan manajemen pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- , *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2000.
- , *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.2003.
- Jac Fitz-enz, *The ROI of Human Capital, Measuring the Economic Value of Employee Performance*, New York: Amacom, 2000.
- Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: UPI/Universitas Pendidikan Indonesia. 2005.
- UU No.20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- PP No.19 tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.